

LAPORAN KINERJA



DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

KABUPATEN KAPUAS HULU

TAHUN 2018



BAB 1 PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Pada dasarnya Laporan Kinerja merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu selama tahun 2018. Capaian Kinerja tahun 2017 tersebut di bandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja ini akan memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Pengukuran kinerja di lakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran di gunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah di tetapkan dapat di lihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator – indikator *outcome* atau *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang di inginkan.



2. Susunan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu 51 Tahun 2016 Tanggal 7 November 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga Dan Sumber Daya Air adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu
 - Sub Bagian Program
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Aparatur
3. Bidang Bina Marga yang terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 - Seksi Perencanaan dan Pengendalian
 - Seksi Pembangunan Jalan
4. Bidang Sumber Daya Air yang terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu
 - Seksi Perencanaan dan Pengendalian
 - Seksi Irigasi, Danau, Sungai dan Drainase
5. Bidang Jasa Konstruksi yang terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 - Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
 - Seksi Pengujian Konstruksi
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi masing-masing tingkatan struktur organisasi adalah sebagai berikut :



1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, jalan, jasa konstruksi dan drainase. Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut penyusunan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air; pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air dengan instansi lainnya; penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan Penataan ruang sub urusan sumber daya air, Jalan, Jasa konstruksi dan drainase; pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan; pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Dinas; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Dinas; pelaksanaan fungsi lain yang di berikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas untuk melaksanakan tugas Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut penyusunan program kerja Sekretariat; pengkoordinasian penyusunan program kerja Dinas; pengelolaan administrasi keuangan Dinas; penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur dan tata laksana Dinas; pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan pengelolaan barang milik Dinas; pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;



pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Bina Marga di pimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan jalan untuk melaksanakan tugas Bidang Bina Marga melaksanakan fungsi sebagai berikut penyusunan program kerja Bidang Bina Marga; penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan jalan kabupaten; penyusunan rencana teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten; pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan jalan kabupaten; pengendalian pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga; pengevaluasi pelaksanaan tugas seksi - seksi pada Bidang Bina Marga secara periodik; pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga secara periodik; pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Bidang Sumber Daya Air di pimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air melaksanakan fungsi sebagai berikut penyusunan program kerja Bidang Sumber Daya Air; penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Sumber Daya Air; pelaksanaan penyusunan rencana teknis pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah; pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai



dalam 1 (satu) daerah; pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 (seribu) hektar; pengendalian pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air secara periodik; pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air secara periodik; pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air secara periodik; pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Bidang Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan jasa konstruksi melaksanakan fungsi sebagai berikut penyusunan program kerja Bidang Jasa Konstruksi; penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Jasa Konstruksi; penyelenggaraan pemberdayaan usaha jasa konstruksi; penyelenggaraan pengawasan usaha jasa konstruksi; pelaksanaan pengujian konstruksi; pengendalian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Jasa Konstruksi secara periodik; pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Jasa Konstruksi secara periodik; pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) di pimpin oleh seorang Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional khusus sesuai dengan bidang keahlian mempunyai tugas



melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang di milikinya.

3. Tupoksi

Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 7 Tahun 2016 Tanggal 3 Oktober 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 51 Tahun 2016 Tanggal 7 November 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu.

Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu adalah unsur pelaksana pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang di pimpin oleh Kepala Dinas. Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Air Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang Bina Marga dan bidang Sumber Daya Air.

Untuk menyelenggarakan tugas di atas, Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan fungsi :

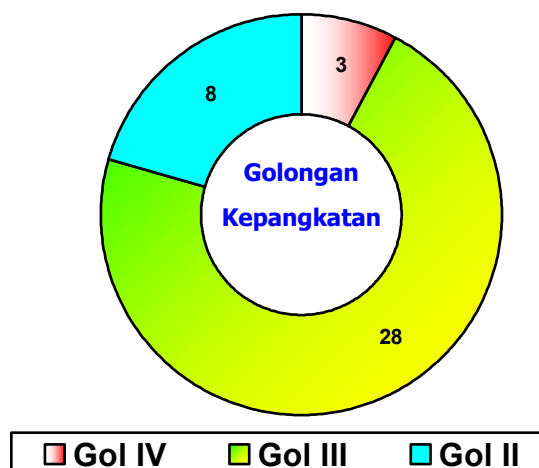
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga dan bidang sumber daya air.
2. Pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air.



3. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
5. Penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik.
6. Pelaksanaan tugas lain yang di serahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu di dukung oleh 39 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 59 orang tenaga Kontrak. Pegawai Negeri Sipil terdiri dari golongan I, II, III, dan IV, dengan rincian sebagai berikut:





Berdasarkan kualifikasi pendidikan, PNS dan tenaga Kontrak adalah sebagai berikut :

No	Kualifikasi Pendidikan	PNS	Tenaga Kontrak	Jumlah
1	S2	6	-	6
2	S1	10	27	37
3	D3	6	8	14
4	D2	1	1	2
5	D1	-	1	1
6	SLTA/Sederajat	15	21	36
7	SLTP	1	2	3
Jumlah Personil		39	59	98

5. Sumber Daya Keuangan

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu di tambah dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang jumlah belum pasti. Penganggaran Dana untuk kegiatan belanja publik maupun aparatur yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu telah mengacu kepada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Sehingga Rencana Strategis ini dapat di manfaatkan dalam penyusunan anggaran (RKA).



6. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Gedung Kantor

Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu telah menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Lingkar Mupa Transmigrasi Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Kendaraan

Kendaraan yang tersedia yaitu :

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. Dump Truck | : 5 buah |
| 2. Pick Up | : 5 buah |
| 3. Alat Berat | : 2 buah |
| 4. Kendaraan Roda Dua | : 49 buah |

Sarana Pendukung dan Perlengkapan kantor lainnya dari sampai tahun 2018 yaitu :

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. AC | : 13 buah |
| 2. Air Compressor | : 2 Unit |
| 3. Alat Penyemprot Rumput 20 L | : 4 buah |
| 4. Alat Ukur/ Meteran | : 28 buah |
| 5. Almari | : 10 buah |
| 6. Almari Arsip | : 9 buah |
| 7. Absorbion of fine Aggregare | : 1 set |
| 8. Brang Kas | : 2 buah |
| 9. Baterai Charger | : 3 unit |



10. Bench Grinder	: 2 Unit
11. Compaction Test	: 1 set
12. Concreat Mixer	: 4 unit
13. Compression Tester manchine	: 2 unit
14. Chain Heist	: 2 unit
15. CCTV	: 1 unit
16. Concrate Hammer Test	: 3 set
17. Core Drilling Machine	: 1 set
18. Concrate Cylender Mold	: 4 set
19. Digital Balance Cap	: 1 Pc
20. Dispenser	: 14 buah
21. Dutch Cone Penetrometer DCP Type ST-40	: 2 set
22. Ductility of Botumoni	: 1 buah
23. Digitale Balance	: 2 buah
24. Diamond Bit 4"	: 1 Pc
25. Drying Oven 32 Liter	: 1 Pc
26. Diamond Bit Series Bit Diameter 4" Beton	: 1 set
27. Electric Sieve Shaker	: 1 set
28. Electric Angle Disk Grinder	: 1 unit
29. Electric Drill 3/8	: 2 unit
30. Flash and fire point test	: 2 buah
31. Filling Kabinet	: 25 buah
32. Faximile	: 1 buah
33. Flashdisk	: 32 buah
34. Gorden	: 1 set
35. Gas Welding/Cutting Set	: 1 unit
36. Gerobak Roda 2	: 4 buah



37. Gerobak Roda I	: 4 buah
38. Hard Disk	: 4 buah
39. Hand Grease Gun	: 4 unit
40. Hidrolic Jack 10 ton	: 3 unit
41. Hidrolic Tester Portable	: 1 unit
42. Handycamp	: 7 buah
43. Hydrometer Analysis Test	: 1 set
44. Internet tahun 2017	: 1 paket
45. Infokus/LCD Proyektor	: 3 buah
46. Jaringan Komputer	: 1 paket
47. Jam Dinding	: 21 buah
48. Jaringan/saluran internet Astinet thn 2012	: 1 unit
49. Kursi Putar	: 1 buah
50. Kursi Plastik	: 10 buah
51. Kursi Lipat	: 23 buah
52. Kursi Kayu	: 4 buah
53. Kursi Kerja	: 4 buah
54. Komputer Pc	: 16 Buah
55. Karbit	: 5 kaleng
56. Kotak Lelang	: 20 buah
57. Kunci Shock	: 3 unit
58. Kunci Pas	: 3 Unit
59. Kursi Kerja Direksi	: 3 buah
60. Kursi Kerja 1 Biro	: 6 buah
61. Kulkas	: 1 buah
62. Kelengkapan Komputer	: 7 buah
63. Kamera Digital (Kamera Survey)	: 38 buah



64. GPS	: 12 buah
65. Lemari Arsip Besi	: 8 buah
66. Los Angeles Abrasion Machine AT-40	: 1 set
67. Laboratory Concrete Mixer (Elektrik)	: 1 set
68. Laboratory Penetration Test	: 1 set
69. Laboratory CBR Test	: 1 set
70. Liquit Limit Test	: 1 set
71. Mesin Chain Shaw 070	: 3 unit
72. Mesin Chain Shaw 038	: 3 unit
73. Mesin Potong Rumput	: 20 Unit
74. Mesin Genset Kapasitas 10 Kw	: 3 buah
75. Mobil Floor Crane 3 Ton	: 2 unit
76. Mesin Chain Shaw	: 1 unit
77. Mesin Las	: 1 unit
78. Mesin Las Oksigen	: 1 unit
79. Mesin Chain Shaw 040	: 2 unit
80. Mesin Gerinda Duduk	: 2 unit
81. Mesin Bor	: 2 unit
82. Monitor Display	: 2 buah
83. Meja Kerja 1 biro	: 9 buah
84. Meja Kerja ½ Biro	: 77 buah
85. Meja Kerja Kepala Dinas	: 1 buah
86. Mesin Tik	: 3 buah
87. Mesin Hitung	: 2 buah
88. Mikrofon	: 1 buah
89. Meja Kerja	: 1 buah
90. Mesin Jilid	: 1 buah



91. Mesin Potong Kertas	: 1 buah
92. Meja Kerja Satpam	: 1 buah
93. Meja Rapat	: 14 buah
94. Meja Kerja Panjang	: 1 buah
95. Mesin Sedot Air	: 2 buah
96. Mesin Genset	: 1 buah
97. Meteran roda	: 4 buah
98. Notebook	: 56 buah
99. Nozzle Tester Machine	: 3 unit
100. Organic Imputeries Test	: 1 set
101. Papan Struktur Organisasi	: 2 buah
102. Papan Data Pegawai	: 1 buah
103. Papan Nama Kantor	: 2 buah
104. Papan Pengumuman	: 1 buah
105. Puller 6 – 10 ton	: 2 unit
106. Pompa Kompesor	: 1 buah
107. Papan Kegiatan Kadis	: 1 buah
108. Papan Nama Darmawanita	: 1 buah
109. Pompa Air Robin	: 2 buah
110. Printer	: 106 buah
111. Pasir Quarsa	: 10 Kg
112. Proving Ring 6000 Lbs Capacity	: 1 Pc
113. Plonter	: 1 unit
114. Plastik Limit Test	: 1 set
115. Rambu Ukur/Alat GPS	: 16 buah
116. Rak Arsip Besi Siku	: 40 buah
117. Speed Boart/Mesin + Body	: 2 unit



118. Suction Pump Oil	: 1 unit
119. Swivel Banck Vise	: 2 unit
120. Sipat Latar (Waterpass Topcon)	: 4 Unit
121. Sofa	: 3 Set
122. Sound System	: 1 buah
123. Scener	: 1 buah
124. Softening Point Test	: 2 huah
125. Sand Cone Test	: 2 set
126. Spesific Grafity Test	: 1 set
127. Slum Test	: 2 set
128. Saybold Viscmeter	: 1 set
129. Sand Equivalent Test	: 1 set
130. Tangga Lipat	: 1 buah
131. Trelley Jack 5 ton	: 1 unit
132. Travo Las Listrik	: 1 Unit
133. Teodolite	: 4 Unit
134. Televisi	: 2 buah
135. UPS	: 29 buah
136. Universal Testing Machine	: 1 Set
137. Vulkanizing Unit	: 1 unit
138. VCD Player	: 1 buah
139. Vertical Impuraties Capping	: 1 set
140. WeldingTransformer	: 1 unit
141. White board	: 4 buah
142. Wireles	: 1 buah
143. Water Bath	: 1 buah



B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016 – 2021 , adalah perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Lima tahun pertama dan kedua RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang di capai saat ini dengan yang di rencanakan sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum di dayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak di manfaatkan dan ancaman yang tidak di antisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat di pecahkan dan di selesaikan dengan baik, tiap – tiap permasalahan diidentifikasi faktor – faktor penentu keberhasilannya di masa datang. Faktor – faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja dan faktor – faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan Pemerintahan.

Adapun permasalahan umum yang di hadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu antara lain :

1. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di bidang keteknikan /teknis belum memadai;
2. Prasarana dan sarana penunjang kegiatan perkantoran masih perlu untuk ditingkatkan;
3. Alokasi anggaran untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur masih terbatas;



4. Luasnya wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang harus di layani oleh jalan Kabupaten, sehingga tidak semua daerah dapat dilaksanakan pembangunannya;
5. Kondisi geografis daerah yang membuat biaya pembangunan jalan menjadi tinggi, sehingga di perlukan dana yang besar untuk dapat melaksanakan pembangunan jalan Kabupaten;
6. Masih banyak Daerah Aliran Sungai (DAS) yang belum terinventarisasi sehingga menyulitkan pengembangan fasilitas pengairan;
7. Kondisi geografis sebagian besar di Kecamatan merupakan daerah sungai sehingga masih perlu di bangun sarana dan prasarana pengaman tebing sungai;
8. Masih minimnya parsarana saluran – saluran drainase / gorong – gorong perkotaan , yang mengakibatkan adanya genangan air di beberapa tempat di wilayah perkotaan, sehingga pembangunan prasarana saluran drainase / gorong – gorong perlu di lakukan;
9. Belum tersedianya sarana dan prasarana laboratorium dan gudang workshop yang menunjang pekerjaan pengujian;
10. Belum terakreditasinya laboratorium pengujian;
11. Rendahnya peran serta asosiasi jasa kontruksi dalam mendukung pembinaan masyarakat jasa kontruksi.



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk merespon berbagai tuntutan perubahan kearah kinerja Pemerintah yang semakin transparan dan akuntabel. Di masa yang akan datang di harapkan mampu menganalisa potensi dan masalah yang di hadapi dengan menyusun desain organisasi yang efektif dan efisien dalam rangka melaksanakan pembangunan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat, selain itu di harapkan Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan dinamika pembangunan dan sumber daya pembangunan yang di miliki dan mampu menyusun kebijakan dalam bentuk program pembangunan.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala Dinas pada setiap akhir tahun anggaran, dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolok ukur, yaitu **inputs** (masukan), **ouputs** (keluaran), **outcomes** (hasil), **benefit** (manfaat) dan **impact** (dampak). Rencana strategis ini merupakan hasil kesepakatan yang melibatkan pucuk pimpinan dan seluruh karyawan yang ada di



Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu serta pertimbangan pendapat ***external stakeholder***.

Rencana Strategis di harapkan dapat bermanfaat bagi penentu arah pembangunan daerah ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang di tunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap aparatur Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu saja, melainkan Pemerintah Daerah dan *stakeholder* lainnya.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu di upayakan untuk di lakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan kemana Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu akan di arahkan dan apa yang ingin di capai.

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang di inginkan, Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu Secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan.



Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcome).

Visi Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu tetap mengacu pada visi pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan tetap memperhitungkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten, adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode tahun 2016 – 2021 adalah :

***“ Menuju Kapuas Hulu Yang Lebih Sejahtera,
Berdaya Saing dan Harmonis”***

2. Penjelasan visi

Visi merupakan pernyataan cita – cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan, kondisi yang dicita – citakan atau di impikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat di ukur capaiannya melalui di berbagai usaha pembangunan, usaha – usaha pembangunan yang di laksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (*level of living*) masyarakat.

Visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan gambaran kesuksesan yang ingin di capai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang di susun dengan memperhatikan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016 – 2021 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).



1. Misi

1. Pernyataan Misi

Pernyataan misi mengandung makna yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya.

Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu untuk lebih eksis dan dapat mengikuti efek global otonomi daerah.

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus di kerjakan dalam usaha mewujudkan Visi, Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi tersebut akan di tempuh melalui 3 (tiga) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih;**
- 2) Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan;**
- 3) Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.**

2. Penjelasan Makna

Ketiga Misi Kabupaten Kapuas Hulu tersebut di atas harus di laksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu. Misi pertama di maknai sebagai upaya untuk memperkuat tata kelola Pemerintahan yang baik. Misi kedua di maknai dengan pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kapuas Hulu. Misi ketiga adalah Misi utama yang harus di emban Dinas Pekerjaan



Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu. Misi ketiga tersebut di maknai sebagai upaya untuk memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu adalah instansi yang mempunyai komitmen yang tinggi dalam memberikan kepuasan kepada seluruh Aparatur Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Agar Komitmen tersebut dapat di wujudkan maka harus ada upaya untuk mewujudkan manajemen Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, agar tercipta kepercayaan masyarakat pada umumnya dan perangkat daerah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu yang proporsional, produktif, efisien, transparan dan akuntabel dengan mengedepankan prinsip - prinsip ***“good govenance”***.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan di capai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategis organisasi. Tujuan di perlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang di miliki.

Sebagai penjabaran dari Misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin di capai di masa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi,



merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang , serta menunjukan secara jelas arah program.

Sedangkan Sasaran Strategis yang di tetapkan Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu. Sasaran-sasaran yang di tetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang di tetapkan telah di capai di harapkan bahwa tujuan strategis juga telah dapat di capai.

Indikator Kinerja Utama ini memiliki maksud dan tujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan di perlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja yang baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang di gunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama bagi Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu di upayakan memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan memadai guna mengukur kinerja satuan kerja pemerintah daerah. Tolak Ukur Indikator Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja pemerintah daerah antara lain : Spesifik, Dapat dicapai, Relevan, Menggambarkan keberhasilan, Dapat di kualifikasikan dan diukur.



Indikator Kinerja Utama tersebut dapat di gunakan untuk beragam kepentingan, antara lain :

1. Perencanaan jangka menengah;
2. Pencapaian tahunan;
3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
4. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
5. Evaluasi kinerja;
6. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun tujuan dan sasaran strategis yang di tetapkan Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

Misi Pertama : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih;

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	
1	Terwujudnya tata kelola Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air yang baik dan bersih, serta berlandaskan pelayanan publik yang berkualitas.	1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air.



Misi Kedua : Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan;

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	
1	Meningkatkan panjang dan kualitas jalan dan jembatan.	1	Meningkatnya kualitas Infrastruktur jalan dan jembatan.

Misi Ketiga : Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	
1	Menyediakan infrastruktur penunjang guna terwujudnya Daerah Irigasi dan Infrastruktur pengendali banjir pada wilayah-wilayah rawan banjir dan pengaman garis sungai pada kewenangan Kabupaten yang rawan abrasi.	1	Meningkatnya kualitas pelayanan irigasi.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	1.	Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap.
	2.	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik.



Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus di pilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu.

Strategi mencakup penentuan kebijakan dan program terpilih dalam rangka mencapai sasaran yang telah di tetapkan dalam periode tahun bersangkutan.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah di sepakati dan di tetapkan oleh pihak terkait dan berwenang untuk di jadikan acuan/pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya pencapaian sasaran, tujuan, visi dan misi instansi. Kebijakan unit kerja hendaknya di selaraskan denga Arah Kebijakan Umum daerah yang di susun setiap tahunnya dan merupakan kesepakatan dengan DPRD untuk dilaksanakan.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, terpadu dan berkelanjutan yang di laksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan, adapun Kebijakan dan program Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :



Sasaran 1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air

No	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	Reformasi demokrasi dan perbaikan tata kelola Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air.	1	Pelayanan administrasi perkantoran.
		2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
		3	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
		4	Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan

No	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	Pemerataan pembangunan jalan dan jembatan keseluruh wilayah yang berorientasi lingkungan.	1	Pembangunan jalan dan jembatan.
		2	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.
		3	Pemberdayaan dan Pengembangan jasa konstruksi
		4	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.



Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan irigasi

No	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1.	Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah.	1	Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairan lainnya.
		2	Pembangunan turap/talud/bronjong

a. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan perencanaan kinerja yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi kebijakan, program dan kegiatan yang akan di laksanakan untuk memecahkan permasalahan di maksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air ini merupakan alat yang bermanfaat untuk mengecek tugas yang telah di bebaskan dan mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah di tetapkan. Selain itu dengan adanya perjanjian kinerja akan lebih mudah mengukur tingkat capaian kinerja Kepala Dinas pada akhir tahun 2018 oleh Bupati karena dapat segera di lakukan perbandingan antara rencana dan realisasi dengan menggunakan sedapat mungkin indikator kinerja yang telah di tetapkan dalam perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan proses yang periodik tahunan dan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan respon terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu



di upayakan untuk di lakukan peningkatan dan perbaikan pada masa-masa mendatang.

Perjanjian kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang di inginkan di masa yang akan datang serta target ***(quantitative objectives)*** apa yang harus di capai di hubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan.

Perjanjian kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan yang di komitmenkan oleh organisasi untuk di capai dalam tahun yang bersangkutan.

Perjanjian Kinerja tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air	1. Predikat Sakip	B
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1. Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	55,00 %
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Irigasi	1. Persentase Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik	50,00, %



NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 7.491.172.100,00	APBD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 658.504.000,00	APBD
3.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 622.549.000,00	APBD
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 148.979.235,00	APBD
5.	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp. 155.559.341.365,00	APBD
6.	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong – Gorong	Rp. 1.124.893.000,00	APBD
7.	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Rp. 445.356.000,00	APBD
8.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	Rp. 4.697.727.800,00	APBD
9.	Pemberdayaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 500.304.000,00	APBD
10.	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.	Rp. 8.615.173.500,00	APBD
TOTAL		Rp. 179.864.000.000,00	



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah . Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Metode dalam pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja di lakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, di gunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja di lakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran di gunakan untuk menunjukkan secara langsung keterkaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat di lihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang di inginkan.

Pada tahap pengukuran dan evaluasi kinerja, beberapa kegiatan di tetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta di sajikan perbandingan dengan capain kinerja pada tahun sebelumnya, sehingga dapat secara langsung menunjukkan keterkaitan antara indikator kegiatan dengan indikator sasaran. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja, maka analisis



lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat di sajikan.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang di peroleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi yang telah di tetapkan. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar di dasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Sebagian lagi berupa indikator hasil yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) dan indikator *benefit*. Sedangkan indikator dampak secara umum baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengumpulan data kinerja saat ini belum sepenuhnya terbangun.

Pengukuran kinerja yang di lakukan mencakup:

- a. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan.
- b. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah di tetapkan, sebagaimana telah di tuangkan dalam Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, di mana tingkat pencapaian sasaran di dasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja sebagaimana di sajikan dalam Lampiran : I.



Hasil pengukuran capaian kinerja di simpulkan untuk masing-masing indikator kinerjanya dan untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan di lakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 S/D 100 : Sangat Berhasil

70 < s/d ≤ 85 : Berhasil

55 < s/d ≤ 70 : Cukup Berhasil

s/d ≤ 55 : Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran di simpulkan berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori ***sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.***

Sedangkan **penyimpulan pada tingkat sasaran** yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan "**Metode Rata-Rata Tertimbang Data Kelompok**". Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu **Sangat Berhasil** (nilai tengah 92,50%), **Berhasil** (nilai tengah 77,50%), **Cukup Berhasil** (nilai tengah 62,50%), dan **Tidak Berhasil** (nilai tengah 27,50%). Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu rata-rata dari hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:



$$\bar{X} = 1/n \sum_{i=1}^k m_i f_i$$

dimana n = jumlah indikator kinerja sasaran

m_i = titik tengah interval nilai capaian indikator kinerja sasaran

f_i = frekwensi nilai capaian indikator pada suatu interval

k = jumlah interval

Hasil perkalian tersebut di simpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal sehingga sasaran tersebut dapat di katagorikan **sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.**

Sementara itu penyimpulan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan adalah hasil pembagian antara jumlah seluruh nilai titik tengah setiap indikator pada masing-masing sasaran di bagi dengan jumlah indikator keberhasilan yang di tetapkan pada tahun bersangkutan.

Hasil pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 per sasaran Strategis adalah sebagai berikut :



Tabel 3.1

**Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber
Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018**

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air	1.	Predikat SAKIP	B	B	100 %
2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.	Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	55,00 %	56,74 %	103,25%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Irigasi	1	Persentase Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik	50,00 %	55,87 %	111.74%



Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat di peroleh data dan informasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu pada beberapa tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Capaian Kinerja	Jumlah IKU	Persentase
1	Sangat Berhasil	2	100%
2	Berhasil	-	-
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Tidak Berhasil	-	-
5	Belum ada Nilai	-	-

Dari 2 (dua) indikator kinerja utama, persentase pencapaian kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Capaian Kinerja	Jumlah Sasaran	Persentase
1	Sangat Berhasil	3	100%
2	Berhasil	-	-
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Tidak Berhasil	-	-
5	Belum Ada Nilai	-	-

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu merupakan pertanggungjawaban Pimpinan Unit Kerja atas pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang di miliki.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu mendapat alokasi anggaran dari APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 183.752.941.000,00 yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 179.864.000.000,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.888.941.000,00 dan telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 181.155.273.314,00 yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 181.155.273.314,00. Laporan Akuntabilitas



Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 menyajikan dan menguraikan mengenai akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu melalui tiga hal pokok yaitu (1) hasil pengukuran kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran (2) evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja baik kegiatan maupun sasaran, serta (3) akuntabilitas keuangan yaitu anggaran dan realisasi belanja.

Secara lebih rinci pencapaian masing-masing sasaran di atas akan diuraikan berikut ini:

Sasaran 1 :

"Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air".

Sasaran "Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air" di arahkan pada upaya meningkatnya predikat Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap. Untuk mewujudkan kelancaran Pelaksanaan sasaran ini dapat mencapai misi yang telah di buat. Pada tahun 2018 untuk mewujudkan sasaran tersebut di harapkan di capai melalui 4 (empat) program, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.



Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran I
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan
Sumber Daya Air

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Predikat SAKIP	Predikat	B	B	100%
Capaian Sasaran Sangat Berhasil (100 %)					

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran I dibandingkan Dengan Realisasi
Tahun – Tahun Sebelumnya

NO	Indikator Kinerja	2016			2017			2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Predikat Sakip	-	-	-	-	-	-	B	B	100%

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran I Dibandingkan Dengan Pencapaian
Akhir Rencana Strategis (RENSTRA)

NO.	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi 2018	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1.	Predikat SAKIP	BB	B	100%



Penyelenggaraan SAKIP Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2018 berdasarkan Evaluasi dari INSPEKTORAT Kabupaten Kapuas Hulu mendapat Predikat " B ". Realisasi Kinerja Tahun 2018 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu Predikat " B " dengan capaian Kinerja sebesar 100 % (Seratus Persen)

Sedangkan Realisasi kinerja indikator Predikat SAKIP tahun 2016 dan tahun 2017 belum ada penilaian terhadap SAKIP.

Beberapa faktor pendukung pencapaian kinerja indikator kinerja SAKIP, antara lain:

- 1.** Pelaksanaan reviu terhadap rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu yang berorientasi terhadap Pencapaian hasil.
- 2.** Reviu terhadap indikator kinerja utama melalui penetapan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu nomor 26 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu.
- 3.** Menetapkan ukuran kinerja eselon III dan IV melalui penetapan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu nomor 25 tentang Indikator Kinerja Individu.
- 4.** Melaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja sampai dengan eselon IV.
Guna lebih mengoptimalkan pencapaian indikator Predikat SAKIP maka Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu telah merencanakan beberapa langkah antara lain :
 1. Monitoring capaian kinerja setiap triwulan
 2. Melaksanakan pengukuran kinerja sampai dengan eselon IV.

Kinerja sasaran " Predikat Sakip " dapat dilihat dari Capaian Indikator Kinerja, Target Kinerja dengan indikator Predikat Sakip Tahun 2018 adalah B , Realisasi B dengan



capaian 100%. Untuk mencapai sasaran dalam Predikat Sakip di laksanakan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi :

- ❖ Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat;
- ❖ Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- ❖ Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional ;
- ❖ Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan;
- ❖ Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- ❖ Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor;
- ❖ Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- ❖ Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- ❖ Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- ❖ Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan;
- ❖ Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman;
- ❖ Kegiatan Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
- ❖ Kegiatan Rapat – rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah;
- ❖ Kegiatan Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa;
- ❖ Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA;
- ❖ Kegiatan Penyediaan jasa pendukung kantor;
- ❖ Kegiatan Penyediaan jasa publikasi.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi :

- ❖ Kegiatan Pengadaan kendaraan Dinas Operasional;
- ❖ Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ;
- ❖ Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional;
- ❖ Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.



3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi :

- ❖ Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal;
- ❖ Kegiatan Belanja honorarium non PNS.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi :

- ❖ Kegiatan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- ❖ Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- ❖ Kegiatan Penyusunan standart operasional prosedur SKPD;
- ❖ Kegiatan Penyusunan rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja tahunan SKPD;
- ❖ Kegiatan Pemeliharaan komputerisasi keuangan dan akuntansi;
- ❖ Kegiatan Penyusunan rencana kerja SKPD;
- ❖ Kegiatan Penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di SKPD;
- ❖ Kegiatan Penyusunan laporan tahunan;
- ❖ Kegiatan Penyusunan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai;

Sasaran 2 :

" Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan "

Sasaran " Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan " di arahkan untuk mewujudkan kelancaran transportasi orang dan barang baik keluar maupun masuk wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dan memberi dukungan bagi terlaksananya program lain yang berhubungan dengan kesiapan modal transportasi darat. Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi pengembangan prasarana jalan dan jembatan dalam rangka keterhubungan antara Kecamatan dan Desa.



Kinerja sasaran “ Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan ” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	Persen	55,00 %	56,74%	103,16 %
	Capaian Sasaran Sangat Berhasil (103,25%)				

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2 dibandingkan Dengan Realisasi Tahun – Tahun Sebelumnya

NO	Indikator Kinerja	2016			2017			2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	45,84%	54,09%	117,99%	50,00%	51,88%	103,76%	55,00%	56,74%	103,16%



Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Dibandingkan Dengan Pencapaian
Akhir Rencana Strategis (RENSTRA)

NO.	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi 2018	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1.	Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	70,00%	56,74%	81,05%

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap tahun 2018 adalah sebesar 56,74% dengan rincian panjang jalan kondisi baik di tambah dengan panjang jalan kondisi sedang, di bagi dengan jumlah panjang jalan Kabupaten Kapuas Hulu sepanjang 1.108,330 km, di kali dengan 100% sama dengan 56,74%. Realisasi kinerja tahun 2018 tersebut melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 55,00 % dengan capaian kinerja sebesar 103,16% dengan kategori sangat berhasil. Sampai dengan akhir tahun 2018 panjang jalan dalam kondisi mantap yang terdiri dari panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 300,948 km dan panjang jalan kondisi sedang sepanjang 327,928 km, sedangkan keseluruhan panjang jalan kabupaten sesuai dengan keputusan Bupati sesuai dengan SK Bupati Nomor 365 tahun 2017 tentang penetapan jalan status ruas – ruas jalan sebagai jalan Kabupaten dan jalan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu sepanjang 1.108,330 Km.

Realisasi kinerja indikator Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap tahun 2018 sebesar 56,74% jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 51,88 % maka terjadi peningkatan kinerja sebesar 91,43%. Realisasi kinerja indikator Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap tahun 2018 sebesar 56,74% jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 54,09% maka terjadi peningkatan kinerja sebesar 95,32%. Realisasi kinerja indikator Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap tahun 2018 sebesar 56,74% jika dibandingkan dengan target akhir RENSTRA sebesar 70,00% maka tingkat kemajuan pencapaian akhir renstra telah mencapai 81,05%.



Beberapa faktor pendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan antara lain:

1. Melaksanakan peningkatan jalan kabupaten pada 21 ruas jalan Kabupaten.
2. Melaksanakan peningkatan jembatan sebanyak 4 unit jembatan dari 857 Unit jembatan pada tahun 2018.

Guna lebih mengoptimalkan pencapaian indikator panjang jalan kondisi mantap maka Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu telah merencanakan beberapa langkah antara lain :

1. Menuntaskan penanganan jalan dan jembatan.
2. Membangun jembatan pada ruas jalan yang jembatannya belum terbangun.
3. Menjaga agar jalan tetap berfungsi dengan baik, dengan melakukan pemeliharaan pada ruas jalan tertentu.
4. Meningkatkan konektivitas ruas jalan Kabupaten.
5. Mencapai kondisi jalan mantap sebesar 60% sesuai target Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Visi Misi Bupati Kapuas Hulu.

Untuk mencapai sasaran persentase panjang jalan kondisi mantap di laksanakan melalui Program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, meliputi :

- a. Kegiatan Pembangunan Jalan Kabupaten ;
- b. Kegiatan Peningkatan Jembatan .

1. Panjang Jalan berdasarkan Permukaan

Dalam rangka memperlancar arus orang dan barang perlu di perhatikan sarana jalan dan jembatan serta alur sungai sebagai alternatif angkutan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, untuk permukaan jalan aspal Kabupaten pada tahun 2018 tercapai 197,440 km , untuk permukaan jalan rigid beton 219,079 km, untuk



permukaan jalan kerikil 373,552 km dan permukaan jalan tanah tercapai 318,289 km.

2. Kondisi Jalan di Kabupaten Kapuas Hulu

Total Panjang jalan di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2018 sepanjang 1.108,330 Km. Dari total panjang tersebut dapat dikategorikan kondisi jalan, yaitu baik, sedang, rusak dan rusak berat. Kondisi jalan di Kabupaten Kapuas Hulu dapat di rinci sebagai berikut :

a. Jalan dalam kondisi baik

Dari total panjang jalan di Kabupaten Kapuas Hulu sepanjang 1.108,330 km di tahun 2018 jalan dalam kondisi baik sepanjang 300,948 km.

b. Jalan dalam kondisi sedang

Dari total panjang jalan di Kabupaten Kapuas Hulu sepanjang 1.108,330 km di tahun 2018 jalan dalam kondisi sedang sepanjang 327,928 km.

c. Jalan dalam kondisi rusak ringan

Dari total panjang jalan di Kabupaten Kapuas Hulu sepanjang 1.108,330 km di tahun 2018 jalan dalam kondisi rusak sepanjang 160,226 km.

d. Jalan dalam kondisi rusak berat

Dari total panjang jalan di Kabupaten Kapuas Hulu sepanjang 1.108,330 km di tahun 2018 jalan dalam kondisi rusak berat sepanjang 319,228 km.

3. Peningkatan Jembatan

Total jumlah jembatan di Kabupaten Kapuas Hulu 857 unit, realisasi jumlah jembatan berjumlah 4 unit pada tahun 2018.



Hambatan dan kendala yang di hadapi dalam mencapai sasaran "Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan " di antaranya adalah :

1. Alokasi anggaran yang cukup terbatas di bandingkan dengan kebutuhan;
2. Luasnya jangkauan lokasi yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Masih terjadi penghambat penyelesaian fisik di lapangan karena kondisi alam;
4. Adanya hambatan pelaksanaan kegiatan proyek di mana bahan / material harus di datangkan dari luar;
5. Adanya perubahan-perubahan desain yang sangat mendasar, akibat tidak adanya sosialisasi dan adanya salah persepsi masyarakat;
6. Adanya mutu pekerjaan pada kegiatan proyek yang kurang memadai;
7. Kurangnya Tenaga Teknis di lapangan, sehingga kurang mampu menterjemahkan dan mengaplikasikan pekerjaan yang di harapkan.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, akan di tempuh langkah sebagai berikut :

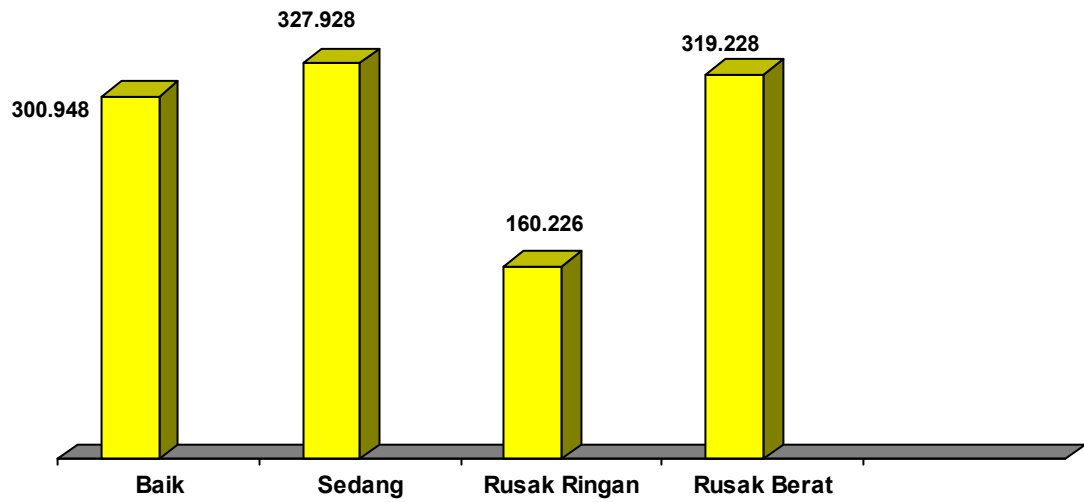
- a. Mengupayakan alokasi anggaran APBD lebih besar, serta mengusulkan dana tambahan ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- b. Mengoptimalkan SDM dan peralatan yang ada sehingga berfungsi optimal dalam menjalankan tugas pokok ke-PU-an;
- c. Memberi pengertian kepada pelaksana agar membuat perhitungan waktu yang matang dalam pelaksanaan di lapangan;



- d. Perencanaan teknis sebaiknya di laksanakan satu tahun sebelum pelaksanaan fisik, sehingga besarnya dana benar-benar dapat mengakomodir target fisik yang di harapkan;
- e. Pelaksanaan proyek pada akhir tahun anggaran tidak mencapai 100% perlu tindakan teguran maupun pembinaan;
- f. Khusus untuk peningkatan jembatan kerangka baja sebaiknya di pisahkan antara pemesanan kerangka baja dengan pelaksanaan Abutment;
- g. Pelaksanaan di lapangan yang belum optimal, pada masa yang akan datang perlu di tingkatkan dengan jalan mengadakan pembinaan kepada kontraktor, sehingga secara bertahap kontraktor memahami betul isi dokumen kontrak dan melaksanakannya sesuai dengan spesifikasi teknik;
- h. Untuk pengendalian mutu pekerjaan dan waktu pelaksanaan, konsultan di harapkan berperan aktif secara profesional dan mandiri.

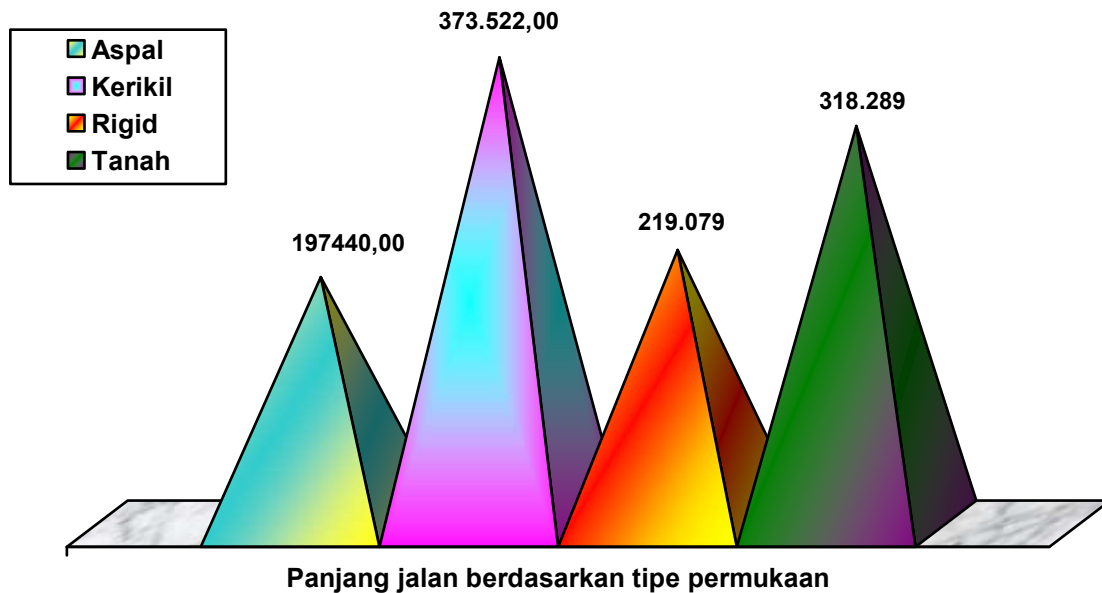


Grafik Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Tahun 2018(Km).





Grafik Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Jenis permukaan Tahun 2018 (KM)



Sasaran 3 :

" Meningkatkan Kualitas Pelayanan Irigasi "

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang sejenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, Irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak. Pada saat ini sudah banyak irigasi model irigasi yang dapat di lakukan, pada masa lalu jika air melimpah karena tempat yang dekat dengan sungai atau sumber mata air maka irigasi di lakukan dengan mengalirkan air tersebut kelahan pertanian. Namun demikian irigasi di lakukan dengan membawa air dengan menggunakan wadah kemudian menuangkan pada tanaman satu persatu. Untuk irigasi model seperti ini



di sebut menyiram. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi.

Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan perlengkap yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Menurut pengelolaan jaringan irigasi di bagi menjadi 3 bagian :

b. Jaringan Irigasi Utama / Primer

Meliputi bangunan bendung, saluran – saluran primer dan sekunder termasuk bangunan utama dan perlengkapan saluran pembawa dan saluran pembuang. Bangunan ini merupakan bangunan yang mutlak di perlukan bagi eksplot, meliputi bangunan pembendung, bangunan pembagi dan bangunan pengukur, bangunan bendung berfungsi agar permukaan air sungai dapat naik dengan demikian memungkinkan untuk di salurkan melalui pintu pemasukan ke saluran pembawa. Bangunan pembagi berfungsi agar air pengairan dapat di distribusikan di sepanjang saluran pembawa (saluran primer) ke lahan – lahan pertanian melalui saluran sekunder dan saluran tersier.

Terdiri pula bangunan ukur yang berfungsi mengukur debit air yang masuk ke saluran, dengan demikian distribusi air pengairan ke lahan – lahan pertanian melalui saluran sekunder dan saluran tersier dapat di kontrol dengan baik sesuai dengan pola pendistribusian air pengairan yang telah di rancang.

c. Jaringan Irigasi Sekunder

Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.



d. Jaringan Irigasi Tersier

Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapannya.

Jaringan irigasi tersier merupakan jaringan pengairan di petak tersier, mulai air luar dari bangunan ukur tersier, terdiri dari saluran tersier dan kuarter termasuk bangunan pembagi tersier dan kuarter yang terdapat di petak.

Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada. Pembangunan jaringan irigasi adalah kegiatan seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatnya fungsi dan kondisi jaringan yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan pertimbangan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu /bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air.

Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu yang di alokasikan dari suatu sumber air suatu daerah irigasi yang di dasari waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi



dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.

Penggunaan Air irigasi adalah kegiatan pemanfaatan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat di perlukan. Pembuangan air irigasi, selanjutnya di sebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak di pergunakan lagi pada daerah irigasi tertentu. Pemeliharaan Jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna mempelancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.

Bendungan merupakan bangunan air yang di bangun secara melintang pada sungai, yang tujuannya agar permukaan air sungai di sekitarnya dapat di alirkan melalui pintu sadap ke saluran – saluran pembagian air pengairan ke lahan – lahan pertanian. Bendungan harus di buat secara kuat agar tetap tahan untuk jangka waktu panjang/lama, tinggi tepi tembok bendung di dasarkan pada debit maksimum untuk jangka waktu tertentu . Bagian – bagian Bendungan meliputi :

- ❖ Badan bendungan yang pembuatannya dari pasangan – pasangan batu kali atau dengan beton, dengan tinggi yang di sesuaikan dengan kepentingan air irigasi;
- ❖ Pintu penguras di buat di ujung badan yang ada bersambung dengan saluran kantong peruras di buatkan pintu masuk;
- ❖ Pintu pengambilan di buat ruang penguras yang di letakkan sekitar 1 meter atau lebih di atas lantai

Untuk tetap menjaga ketersediaan pangan antara lain melalui pengamanan lahan sawah di daerah irigasi, peningkatan mutu intensifikasi, serta optimalisasi dan



perluasan areal pertanian. Irigasi di suatu wilayah sangatlah di perlukan guna meningkatkan kinerja jaringan irigasi pada wilayah tersebut. Dan untuk menunjang sasaran " Meningkatkan kualitas pelayanan irigasi" pada Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu dapat di lihat melalui indikator – indikator sebagai berikut :

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 3
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Irigasi

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik	Persen	50,00 %	55,87 %	111,74 %
	Capaian Sasaran Sangat Berhasil (111,74 %)				

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 3 di bandingkan dengan realisasi Tahun – Tahun Sebelumnya

NO	Indikator Kinerja	2017			2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik	36,89,00%	39,91%	108,19%	50,00%	55,87%	111,74 %



Tabel 3.11
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 3 di bandingkan dengan Pencapaian Akhir Rencana Strategis (RENSTRA)

NO.	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi 2018	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
1.	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik	75,00%	55,87%	74,49 %

Target Kinerja sasaran “ Meningkatnya Kualitas Pelayanan Irigasi ” luas irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2018 adalah 3.445 Ha dan luas irigasi Kabupaten 6.166 Ha, dengan target 50,00%, realisasi 55,87% dengan rincian luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik di bagi luas irigasi Kabupaten di kali dengan 100%. Capaian pada tahun 2018 adalah 111,74% di banding dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 dengan target 35,89%, realisasi 39,91% dengan capaian 108,19%. Maka terjadi peningkatan sebesar 96,82 %.

Realisasi pada tahun 2018 adalah 55,87% di bandingkan dengan target akhir RENSTRA yaitu 75,00% jadi tingkat kemajuannya adalah 74,49 %. Untuk mencapai sasaran tercapainya persentase irigasi dalam kondisi baik di laksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Program Meningkatnya Kualitas Pelayanan Irigasi Kondisi Baik, meliputi ;

- a. Kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
- b. Kegiatan pembangunan turap,talud dan bronjong.

Hambatan dan kendala yang di hadapi dalam mencapai sasaran “ Meningkatnya Kualitas Pelayanan Irigasi Dalam Kondisi Baik ” di antaranya adalah :

- a. Alokasi anggaran masih terbatas di bandingkan dengan kebutuhan;
- b. Ada beberapa Daerah irigasi di Kabupaten Kapuas Hulu yang masih sulit di jangkau dengan jarak tempuh cukup jauh menuju lokasi;
- c. Kondisi alam yang tidak menentu yang dapat menghambat kelancaran pekerjaan fisik di lapangan.



Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini, akan di tempuh langkah sebagai berikut :

1. Mengupayakan alokasi anggaran APBD lebih besar, serta mengusulkan dana tambahan ke Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
2. Berupaya membuka akses di Daerah irigasi yang sulit di jangkau;
3. Ada antisipasi mengenai kondisi alam di Kabupaten Kapuas Hulu.

B. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai target kinerja tahun anggaran 2018, Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabuptaen Kapuas Hulu mempunyai 10 (sepuluh) program dan 45 (empat puluh lima) kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program ini meliputi :

- ❖ Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat;
- ❖ Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- ❖ Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional;
- ❖ Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan;
- ❖ Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- ❖ Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor;
- ❖ Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- ❖ Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- ❖ Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- ❖ Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan;
- ❖ Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman;



- ❖ Kegiatan Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
- ❖ Kegiatan Rapat – rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah;
- ❖ Kegiatan Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa;
- ❖ Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA;
- ❖ Kegiatan Penyediaan jasa pendukung kantor;
- ❖ Kegiatan Penyediaan jasa publikasi.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program ini meliputi :

- ❖ Kegiatan Pengadaan kendaraan Dinas Operasional;
- ❖ Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ;
- ❖ Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional;
- ❖ Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program ini meliputi:

- ❖ Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal;
- ❖ Kegiatan Belanja honorarium non PNS.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, Program ini meliputi :

- ❖ Kegiatan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- ❖ Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- ❖ Kegiatan Penyusunan standart operasional prosedur SKPD;
- ❖ Kegiatan Penyusunan rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja tahunan SKPD;
- ❖ Kegiatan Pemeliharaan komputerisasi keuangan dan akuntansi instansi;
- ❖ Kegiatan Penyusunan rencana kerja SKPD;
- ❖ Kegiatan Penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah LPPD;
- ❖ Kegiatan Penyusunan laporan tahunan;
- ❖ Kegiatan Penyusunan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai;



- ❖ Kegiatan penyusunan analisis jabatan.

5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program ini meliputi :

- ❖ Kegiatan pembangunan jalan Kabupaten;
- ❖ Kegiatan peningkatan jembatan.

6. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, Program ini meliputi:

- ❖ Kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.

7. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, Program ini meliputi:

- ❖ Kegiatan pembangunan turap/talud/bronjong

8. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan, Program ini meliputi:

- ❖ Kegiatan Rehabilitasi /Pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan.

9. Pemberdayaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi, Program ini meliputi:

- ❖ Kegiatan Pengadaan alat – alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan;
- ❖ Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan;
- ❖ Kegiatan pelaksanaan pengujian mutu konstruksi di lapangan dan pada laboratorium Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air;
- ❖ Sosialisasi dan publikasi informasi dan pengaturan terkait jasa konstruksi ;
- ❖ Pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi di Kabupaten Kapuas Hulu;
- ❖ Pelatihan tenaga terampil konstruksi.

10. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Pengairan Lainnya, Program ini meliputi :

- ❖ Kegiatan Rehabilitasi /pemeliharaan jaringan irigasi

Anggaran dan Realisasi Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :



No.	Program	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	(%)
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
	Belanja Pegawai/Personalia	3.888.941.000	3.761.090.901	96,71
B.	BELANJA LANGSUNG			
	➤ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.491.172.100	7.303.239.626	97,49
	➤ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	658.504.000	638.961.950	97,03
	➤ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	622.549.000	529.595.300	85,07
	➤ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	148.979.235	145.206.600	97,46
	➤ Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	155.559.341.365	153.875.140.373	98,91
	➤ Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	1.124.893.000	1.124.893.000	100
	➤ Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	445.356.000	445.356.000	100
	➤ Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	4.697.727.800	4.697.658.000	100
	➤ Program Pemberdayaan dan Pengembangan Jasa Kontruksi	500.304.000	429.987.564	85,94
	➤ Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	8.615.173.500	8.204.144.000	95,22
	Jumlah	183.752.941.000	181.155.273.314	98,58



Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air	Persentase Predikat SAKIP	B	B	100%	8.921.204.335,00	8.617.003.486,00	96,59%	3,41%
2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	55,00%	56,74%	103,16%	155.559.341.365,00	153.875.140.373,00	98,91%	21,81%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Irigasi	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik	50,00%	55,87%	111,74%	8.615.173.500,00	8.204.144.000,00	95,22%	16,52%



BAB 4 PENUTUP

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu yang di sajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018, dapat di simpulkan bahwa 3 (tiga) sasaran dalam sasaran 1 “ **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air** ” dengan capaian indikator sasaran ***Predikat SAKIP*** dikategorikan ***Sangat Berhasil***, sasaran 2 “ **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan** ” dengan capaian Indikator sasaran ***Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap*** di kategorikan ***Sangat Berhasil*** , sasaran 3 “ **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Irigasi** ” dengan capaian indikator sasaran ***Persentase Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik*** di katagorikan ***Cukup Berhasil***.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa secara umum Kinerja Dinas Pekerjaan Umum,Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu selama tahun anggaran 2018 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat di katagorikan ***SANGAT BERHASIL***.

Keberhasilan pencapaian sasaran – sasaran tersebut di atas menggambarkan keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu beserta jajarannya dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Selain itu, keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dapat memberikan kontribusi positif pada pencapaian misi – misi yang telah di tetapkan.



Namun demikian, capaian tersebut yang belum optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, yang di sebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang di hadapi antara lain :

1. Kapasitas kelembagaan dan aparatur daerah belum optimal, keterbatasan sumber daya, baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan kepada unit pemerintah lainnya maupun pelayanan kepada masyarakat pada umumnya.
3. Masih terbatasnya sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah, sehingga kemampuan untuk membiayai diri sendiri masih kurang.
4. Kondisi alam dan kondisi cuaca yang tidak menentu.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan motivasi yang sangat berharga bagi Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu beserta seluruh jajarannya. Untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang akan di rumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan di jadikan dasar memperbaiki arah kebijakan yang dapat memacu peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air, yaitu sebagai berikut:

1. Lebih menggerakkan faktor dukungan dari masyarakat dalam mewujudkan kondisi kondusif bagi pembangunan, sebagai implementasi dan dinamika otonomi daerah.
2. Lebih menggerakkan serta mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya Pembangunan Daerah berkelanjutan, sebagai implementasi dari faktor dinamika otonomi "*Management Skill* " sehingga lahir kesamaan visi dan misi serta



keselarasan tujuan pembangunan antara aparat pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat.

3. Lebih mengoptimalkan pembangunan dan penyediaan informasi dalam rangka mendorong peningkatan investasi dalam bentuk kerjasama bilateral, sebagai implementasi faktor kunci dinamika otonomi.
4. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui peningkatan sumber daya manusia yang profesional, penyempurnaan infrastruktur dan perangkat peraturan Pemerintah Daerah serta membuka akses jalur-jalur perdagangan.
5. Meningkatkan berbagai upaya dalam rangka pengamanan, pengelolaan dan pemakaian aset daerah secara transparan, aman dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan pembinaan administrasi kelembagaan perangkat daerah, meningkatkan motivasi, disiplin, moral dan etos kerja aparatur dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana usaha di berbagai bidang pembinaan kepada masyarakat.
8. Mendorong terselenggaranya proses pendidikan dan pembinaan kepada aparatur untuk memenuhi kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam rangka mewujudkan profesionalisme dalam pelayanan kepada masyarakat.
9. Mengupayakan secara terus menerus dan berkesinambungan membangun serta menyediakan peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur terutama yang berkaitan dengan pelayanan serta sarana komunikasi dan informasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
10. Meningkatkan koordinasi antar unit kerja dan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan.



11. Meningkatkan sumber pembiayaan daerah dengan menggali potensi penerimaan daerah melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi penerimaan PAD.
12. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun di luar kedinasan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mengantisipasi persaingan bebas di masa mendatang.
13. Mengupayakan penerapan "*reward dan punishment*" secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
14. Meningkatkan pemanfaatan laporan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Sebagai akhir kata, Kami beserta segenap Aparatur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu mengharapkan agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat di jadikan salah satu acuan oleh Instansi Pemerintah lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja.



Terima kasih

PENGUKURAN KINERJA ESSELON II (DUA) TAHUN 2018
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	1	Predikat Sakip	B	B	100,00%
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	2	Persentase panjang jalan kondisi mantap	55,00%	56,74%	103,16%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan irigasi	3	Persentase irigasi dalam kondisi baik	50,00%	55,87%	111,74%

Putussibau, Desember 2018
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU

Hj. ANA MARIANA, S.T., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670325 199703 2 002

PENGUKURAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIS

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%	97,50%	97,50%
2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	2	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100,00%	97,03%	97,03%
3	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	3	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	87,00%	85,07%	97,78%
4	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%	97,47%	97,47%

Putussibau, Desember 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIS

Agus Darmanta.S.T.,M.T.
Pembina
NIP. 19700809 200003 1 005

PENGUKURAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KAPUAS HULU
KASUBBAG PROGRAM

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya penyusunan laporan RKA,DPA dan DPPA	1	Terlaksananya Penyusunan Laporan RKA,DPA dan DPPA DPU.BM&SDA	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%
2	Meningkatnya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD DPU.BM&SDA (Laporan Kinerja, RENJA,RKT,PKT,IKU)	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%
3	Meningkatnya penyusunan standart operasional prosedur SKPD	3	Terlaksananya Penyusunan Standar Operating Prosedur	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
4	Meningkatnya penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah di SKPD	4	Terlaksananya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
5	Meningkatnya penyusunan laporan tahunan	5	Terlaksananya penyusunan Laporan Tahunan Proyek DPU.BM&SDA	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%

Putussibau, Desember 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU
KASUBBAG PROGRAM

Ramdhani,A.Md.
Penata Tk. I
NIP. 19660812 198803 1 015

PENGUKURAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KAPUAS HULU
KASUBBAG KEUANGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya pemeliharaan komputerisasi keuangan dan akuntansi instansi	1	Terealisasinya Penyusunan serta Pemeliharaan Jaringan Komputer secara Optimal	9 Dokumen	9 Dokumen	100,00%

Putussibau, Desember 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU
KASUBBAG KEUANGAN

Parino,A.Md.
Penata Tk. I
NIP. 1964027 199303 1008

PENGUKURAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KAPUAS HULU
KASUBBAG UMUM DAN APRARATUR

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
1	Terlaksanannya penyediaan jasa surat menyurat	1	Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan Administrasi yang tertib	100,00%	91,54%	91,54%
2	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2	Tersedianya Proses Administrasi dan Pelayanan yang Maksimal	12 bulan	12 bulan	100,00%
3	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3	Terwujudnya Peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	80,47%	80,47%
4	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4	Tersedianya Administrasi kelengkapan Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional yang Optimal	12 Buah	12 Buah	100,00%

Putussibau, Desember 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU
KASUBBAG UMUM DAN APARATUR

Martina
Penata Tk. I
NIP. 19621231 198603 2 086

PENGUKURAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KAPUAS HULU
KEPALA BIDANG BINA MARGA

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
1	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan	1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	55,00%	56,74%	103,16%

Putussibau, Desember 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU
KEPALA BIDANG BINA MARGA

Dedy,S.T.,M.T.
Penata Tk. I
NIP. 19750506 200401 1 001

PENGUKURAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KAPUAS HULU
KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
1	Tersusunnya dokumen perencanaan teknis pembangunan jalan	1	Jumlah dokumen perencanaan teknis jalan	15 Paket	15 Paket	100,00%
2	Tersusunnya dokumen pengawasan teknis peningkatan jalan	2	Jumlah dokumen pengawasan peningkatan jalan	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
3	Tersusunnya dokumen perencanaan teknis jembatan	3	Jumlah dokumen perencanaan teknis jembatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
4	Tersusunnya dokumen pengawasan teknis jembatan	4	Jumlah dokumen pengawasan teknis jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%

Putussibau, Desember 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU
KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

Muhammad Kharbi, S.T., M.Sc.
Penata
NIP. 19820312 200902 1 003

PENGUKURAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KAPUAS HULU
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JALAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
1	Terlaksananya pembangunan jalan	1	- Panjang jalan terbangun	1.108,330 KM	1.108,330 KM	100,00%
		2	- Panjang jalan yang di tangani	50 KM	68,710 KM	137,42%
2	Terlaksananya peningkatan jembatan	3	Jumlah jembatan yang ditingkatkan	4 Unit	4 Unit	100,00%

Putussibau, Desember 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JALAN

Farid Setiawan, S.T.
Penata
NIP. 19830912 200803 1 001

PENGUKURAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KAPUAS HULU
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Lainnya	1	Persentase irigasi primer dan Sekunder dlm kondisi baik	50,00%	55,87%	111,74%
2	Meningkatnya Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	2	Persentase Pembangunan Drainase/Gorong-gorong dalam kondisi baik	600 M	716,53 M	119,42%
3	Meningkatnya pengamanan daerah rawan longsor/Abrasi	3	Persentase Turap/Talud/Bronjong yang di Bangun	492 M	113 M	22,97%

Putussibau, Desember 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR

Raimundus Jayang,S.T.,M.Eng.

Penata Tk. I

NIP. 19690217 200301 1 001

PENGUKURAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KAPUAS HULU
KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan/pemeliharaan jaringan irigasi	1	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/pemeliharaan jaringan irigasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
2	Terlaksananya pengawasan peningkatan yang baik dan efektif	2	Jumlah dokumen pengawasan	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%

Putussibau, Desember 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU
KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

Syarifudin,S.T.
Penata
NIP. 19750421 201001 1 004

PENGUKURAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KAPUAS HULU
KEPALA SEKSI IRIGASI, DANAU, SUNGAI DAN DRAINASE

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
1	Terlaksananya Pembangunan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	1	- Luas Irigasi yang direhabilitasi	433,36 Ha	191,14 Ha	44,11%
		2	- Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara	166,46 Ha	433,36 Ha	260,34%
2	Terlaksananya Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	3	Jumlah Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	600 M	716,53 M	119,42%
3	Terlaksananya Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	4	Panjang Turap/Talud/Bronjong yang di Bangun	492 M	113 M	22,97%

Putussibau, Desember 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU
KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

NAMA
PANGKAT
NIP.

PENGUKURAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KAPUAS HULU
KEPALA BIDANG JASA KONSTRUKSI

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan jasa konstruksi	1	Persentase pemberdayaan dan pengembangan jasa konstruksi	82,50%	85,95%	104,18%

Putussibau, Desember 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU
KEPALA BIDANG JASA KONSTRUKSI

Ir. Salahuddin.M.T.
Pembina
NIP. 19640106 199903 1 001

PENGUKURAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KAPUAS HULU
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
1	Terselenggaranya Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten kapuas hulu	1	Jumlah peserta sosialisasi	60 Orang	55 Orang	91,67%
2	Terlaksanannya Kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi di Kabupaten Kapuas Hulu	2	Jumlah penyedia jasa yang mengajukan rekon IUJK dan pembuatan kartu PJT	244	197	80,74%
3	Terlaksanannya pelatihan tenaga terampil konstruksi	3	Jumlah tenaga terampil yang di latih	30 Orang	30 Orang	100,00%

Putussibau, Desember 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

Ariwan
Penata Tk. I
NIP. 19650915 198703 1 012

PENGUKURAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KAPUAS HULU
KEPALA SEKSI PENGUJIAN KONSTRUKSI

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
1	Terlaksananya Pembuatan Disain Mix Formula dan Pengujian Mutu Konstruksi di Lapangan	1	Jumlah disainmix yang dibuat	100 Dok	116 Dok	116,00%

Putussibau, Desember 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU
KEPALA SEKSI PENGUJIAN KONSTRUKSI

Marselinus Tajak
Penata Tk. I
NIP. 19660515 198603 1 019

PENGUKURAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KAPUAS HULU
KEPALA UPJJ ID Wilayah I

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
1	Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan	1	- jumlah jembatan yang direhabilitasi/pemeliharaan	- Jembatan 22 Buah	26 Buah	118,18%
		2	- Jumlah turap yang direhabilitasi/pemeliharaan	- Turap kayu 1 Buah	1 Buah	100,00%

Putussibau, Desember 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU
KEPALA UPJJ ID Wilayah I

Yahya.S. T.
Penata Tk. I
NIP. 19680324 200604 1 004

PENGUKURAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KAPUAS HULU
KEPALA UPJJ ID Wilayah II

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6
1	Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan	1	- Jumlah ruas jalan yang direhabilitasi/pemeliharaan	- Jalan 5000 M²	2.878,625 M	57,57%
		2	- Jumlah jembatan yang direhabilitasi/pemeliharaan	- Jembatan 25 Unit	24 Unit	96,00%

Putussibau, Desember 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU
KEPALA UPJJ ID Wilayah II

Arie Eko Apriyanto, S.T.
Penata
NIP. 19780401 199803 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target Tahun 2018
1	2	3		4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	1	Predikat Sakip	B
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	2	Persentase panjang jalan kondisi mantap	55,00%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan irigasi	3	Persentase irigasi dalam kondisi baik	50,00%

NO	PROGRAM	ANGGARAN		KET
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp	7.491.172.100,00	APBD
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rp	658.504.000,00	APBD
3	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Rp	622.549.000,00	APBD
4	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Rp	148.979.235,00	APBD
5	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Rp	155.559.341.365,00	APBD
6	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	Rp	1.124.893.000,00	APBD
7	PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	Rp	445.356.000,00	APBD
8	REHABILITASI / PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN	Rp	4.697.727.800,00	APBD
9	PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp	500.304.000,00	APBD
10	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNNYA	Rp	8.615.173.500,00	APBD
T O T A L		Rp	179.864.000.000,00	

Pihak Kedua
BUPATI KAPUAS HULU

A. M. NASIR,S.H.

Putussibau, Oktober 2018
Pihak Pertama
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU

Hj. ANA MARIANA,S.T.,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670325 199703 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
SEKRETARIS

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00%
2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100,00%
3	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	87,00%
4	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 13.575.000,00	APBD
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 102.000.000,00	APBD
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 84.300.000,00	APBD
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp 27.000.000,00	APBD
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp 167.280.000,00	APBD
6	Penyediaan jasa pengaman dan kebersihan kantor	Rp 39.582.000,00	APBD
7	Penyediaan alat tulis kantor	Rp 244.656.700,00	APBD
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 85.343.600,00	APBD
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 9.000.000,00	APBD
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 434.978.000,00	APBD
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 28.200.000,00	APBD
12	Penyediaan makanan dan minuman	Rp 198.595.000,00	APBD
13	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 1.280.626.000,00	APBD
14	Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	Rp 3.363.755.000,00	APBD

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4
16	Penyusunan RKA dan DPA	Rp 17.025.000,00	APBD
17	Penyediaan jasa pendukung kantor	Rp 1.246.532.800,00	APBD
18	Penyediaan jasa publikasi	Rp 129.523.000,00	APBD
19	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 255.000.000,00	APBD
20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 393.504.000,00	APBD
21	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp 10.000.000,00	APBD
22	Pendidikan dan pelatihan formal	Rp 622.549.000,00	APBD
23	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp 15.640.700,00	APBD
24	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 16.350.035,00	APBD
25	Penyusunan standar operasional prosedur SKPD	Rp 2.500.000,00	APBD
26	Pemeliharaan komputerisasi keuangan dan akuntansi instansi	Rp 90.000.000,00	APBD
27	Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah di SKPD	Rp 5.000.000,00	APBD
28	Penyusunan laporan tahunan	Rp 5.000.000,00	APBD
29	Penyusunan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai	Rp 6.709.500,00	APBD
30	Penyusunan analisis jabatan	Rp 7.779.000,00	APBD
TOTAL		Rp 8.921.204.335,00	

Putussibau, Oktober 2018

Pihak Pertama
SEKRETARIS

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU

Hj. Ana Mariana, S.T., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670325 199703 2 002

Agus Darmanta, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 19700809 200003 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KASUBBAG PROGRAM

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018
1	2	3	4
1	Meningkatnya penyusunan laporan RKA,DPA dan DPPA	Terlaksananya Penyusunan Laporan RKA,DPA dan DPPA DPU.BM&SDA	3 Dokumen
2	Meningkatnya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD DPU.BM&SDA	5 Dokumen
3	Meningkatnya penyusunan standart operasional prosedur SKPD	Terlaksananya Penyusunan Standar Operating Prosedur	1 Dokumen
4	Meningkatnya penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah di SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	1 Dokumen
5	Meningkatnya penyusunan laporan tahunan	Terlaksananya penyusunan Laporan Tahunan Proyek DPU.BM&SDA	1 Dokumen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1	Penyusunan RKA dan DPA	Rp 17.025.000,00	APBD
2	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp 15.640.700,00	APBD
3	Penyusunan standar operasional prosedur SKPD	Rp 2.500.000,00	APBD
4	Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah di SKPD	Rp 5.000.000,00	APBD
5	Penyusunan laporan tahunan	Rp 5.000.000,00	APBD
TOTAL		Rp 45.165.700,00	

Pihak Kedua
SEKRETARIS

Putussibau, Oktober 2018
Pihak Pertama
KASUBBAG PROGRAM

Agus Darmanta,S.T.,M.T.
Pembina
NIP. 19700809 200003 1 005

Ramdhani,A.Md.
Penata Tk. I
NIP. 19660812 198803 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KASUBBAG KEUANGAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018
1	2	3	4
1	Meningkatnya pemeliharaan komputerisasi keuangan dan akuntansi instansi	Terealisasinya Penyusunan serta Pemeliharaan Jaringan Komputer secara Optimal	9 Dokumen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 16.350.035,00	APBD
2	Pemeliharaan komputerisasi keuangan dan akuntansi instansi	Rp 90.000.000,00	APBD
TOTAL		Rp 106.350.035,00	

Pihak Kedua
SEKRETARIS

Putussibau, Oktober 2018
Pihak Pertama
KASUBBAG KEUANGAN

Agus Darmanta,S.T.,M.T.
Pembina
NIP. 19700809 200003 1 005

Parino,A.Md.
Penata Tk. I
NIP. 1964027 199303 1008

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KASUBBAG UMUM DAN APRARATUR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018
1	2	3	4
1	Terlaksanannya penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan Administrasi yang tertib	100,00%
2	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Proses Administrasi dan Pelayanan yang Maksimal	12 bulan
3	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terwujudnya Peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%
4	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Administrasi kelengkapan Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional yang Optimal	12 Buah

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 13.575.000,00	APBD
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Rp 102.000.000,00	APBD
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan	Rp 84.300.000,00	APBD
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan	Rp 27.000.000,00	APBD
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp 167.280.000,00	APBD
6	Penyediaan jasa pengaman dan kebersihan	Rp 39.582.000,00	APBD
7	Penyediaan alat tulis kantor	Rp 244.656.700,00	APBD
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 85.343.600,00	APBD
9	Penyediaan komponen instalasi	Rp 9.000.000,00	APBD
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 434.978.000,00	APBD
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Rp 28.200.000,00	APBD
12	Penyediaan makanan dan minuman	Rp 198.595.000,00	APBD
13	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar	Rp 1.280.626.000,00	APBD
14	Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja	Rp 3.363.755.000,00	APBD
15	Penyediaan administrasi pengadaan barang dan	Rp 19.200.000,00	APBD
16	Penyediaan jasa pendukung kantor	Rp 1.246.532.800,00	APBD
17	Penyediaan jasa publikasi	Rp 129.523.000,00	APBD
18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 255.000.000,00	APBD
19	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Rp 393.504.000,00	APBD
20	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan	Rp 10.000.000,00	APBD
21	Pendidikan dan pelatihan formal	Rp 622.549.000,00	APBD
22	Penyusunan standar teknis kegiatan sasaran kerja pegawai	Rp 6.709.500,00	APBD
23	Penyusunan analisis jabatan	Rp 7.779.000,00	APBD
TOTAL		Rp 8.769.688.600,00	

Pihak Kedua
SEKRETARIS

Agus Darmanta, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 19700809 200003 1 005

Putussibau, Oktober 2018
Pihak Pertama
KASUBBAG UMUM DAN APRARATUR

Martina
Penata Tk. I
NIP. 19621231 198603 2 086

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KEPALA BIDANG BINA MARGA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018
1	2	3	4
1	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	55,00%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1	Pembangunan jalan kabupaten	Rp 135.434.644.365,00	APBD
2	Peningkatan jembatan	Rp 20.124.697.000,00	APBD
TOTAL		Rp 155.559.341.365,00	

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU

Putussibau, Oktober 2018
Pihak Pertama
KEPALA BIDANG BINA MARGA

Hj. Ana Mariana, S.T., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670325 199703 2 002

Dedy, S.T., M.T.
Penata Tk. I
NIP. 19750506 200401 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018
1	2	3	4
1	Tersusunnya dokumen perencanaan teknis pembangunan jalan	Jumlah dokumen perencanaan teknis jalan	15 Paket
2	Tersusunnya dokumen pengawasan teknis peningkatan jalan	Jumlah dokumen pengawasan peningkatan jalan	2 Dokumen
3	Tersusunnya dokumen perencanaan teknis jembatan	Jumlah dokumen perencanaan teknis jembatan	2 Paket
4	Tersusunnya dokumen pengawasan teknis jembatan	Jumlah dokumen pengawasan teknis jembatan	1 Dokumen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1	Pembangunan jalan kabupaten	Rp 2.160.642.500,00	APBD
	<i>Perencanaan Teknis Jalan Tahun Anggaran 2019 (Pelaksanaan Tahun 2018)</i>	<i>Rp 1.050.000.000,00</i>	
	<i>Pengawasan Teknis Jalan</i>	<i>Rp 1.110.642.500,00</i>	
2	Peningkatan jembatan	Rp 613.490.000,00	APBD
	<i>Perencanaan Teknis Jembatan Tahun Anggaran 2019 (Pelaksanaan Tahun 2018)</i>	<i>Rp 200.000.000,00</i>	
	<i>Pengawasan Teknis Peningkatan Jembatan Kabupaten</i>	<i>Rp 413.490.000,00</i>	
TOTAL		Rp 2.774.132.500,00	

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG BINA MARGA
BINA MARGA

Dedy,S.T.,M.T.
Penata Tk. I
NIP. 19750506 200401 1 001

Putussibau, Oktober 2018
Pihak Pertama
KEPALA SEKSI
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

Muhammad Kharbi,S.T.,M.Sc.
Penata
NIP. 19820312 200902 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JALAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018
1	2	3	4
1	Terlaksananya pembangunan jalan	- Panjang jalan terbangun	1.108,330 Km
		- Panjang jalan yang di tangani	50 Km
2	Terlaksananya peningkatan jembatan	Jumlah jembatan yang ditingkatkan	4 Unit

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1	Pembangunan jalan kabupaten	Rp 133.274.001.865,00	APBD
2	Peningkatan jembatan	Rp 19.511.207.000,00	APBD
TOTAL		Rp 152.785.208.865,00	

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
BINA MARGA

DEDY,S.T.,M.T.
Penata Tk. I
NIP. 19750506 200401 1 001

Putussibau, Oktober 2018
Pihak Pertama
KEPALA SEKSI
PEMBANGUNAN JALAN

Farid Setiawan,S.T.
Penata
NIP. 19830912 200803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Lainnya	Persentase irigasi primer dan Sekunder dlm kondisi baik	50,00%
2	Meningkatnya Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase Pembangunan Drainase/Gorong-gorong dalam kondisi baik	600 M
3	Meningkatnya pengamanan daerah rawan longsor/Abrasi	Persentase Turap/Talud/Bronjong yang di Bangun	492 M

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Rp 1.124.893.000,00	APBD
2	Pembangunan turap/talud/bronjong	Rp 445.356.000,00	APBD
3	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rp 8.615.173.500,00	APBD
TOTAL		Rp 10.185.422.500,00	

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU

Putussibau, Oktober 2018
Pihak Pertama
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR

Hj. Ana Mariana,S.T.,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670325 199703 2 002

Raimundus Jayang,S.T.,M.Eng.
Penata Tk. I
NIP. 19690217 200301 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018
1	2	3	4
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan/pemeliharaan jaringan irigasi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/pemeliharaan jaringan irigasi	1 Dokumen
2	Terlaksananya pengawasan peningkatan yang baik dan efektif	Jumlah dokumen pengawasan	3 Dokumen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Rp 89.815.000,00	APBD
	Biaya Pengawasan	Rp 89.815.000,00	
2	Pembangunan turap/talud/bronjong	Rp 92.455.000,00	APBD
	Biaya Pengawasan	Rp 92.455.000,00	
3	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rp 540.265.000,00	APBD
	Perencanaan Teknis Peningkatan Jaringan Irigasi	Rp 247.555.000,00	
	Pengawasan Teknis Peningkatan Jaringan Irigasi	Rp 292.710.000,00	
TOTAL		Rp 722.535.000,00	

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
SUMBER DAYA AIR

Putussibau, Oktober 2018
Pihak Pertama
KEPALA SEKSI
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN

Raimundus Jayang, S.T., M.Eng.
Penata Tk. I
NIP. 19690217 200301 1 001

Syarifudin, S.T.
Penata
NIP. 19750421 201001 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KEPALA SEKSI IRIGASI, DANAU, SUNGAI DAN DRAINASE

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pembangunan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	- Luas Irigasi yang direhabilitasi	433,36 Ha
		- Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara	166,46 Ha
2	Terlaksananya Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun	600 M
3	Terlaksananya Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Panjang Turap/Talud/Bronjong yang di Bangun	492 M

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Rp 1.035.078.000,00	APBD
2	Pembangunan turap/talud/bronjong	Rp 352.901.000,00	APBD
3	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rp 8.074.908.500,00	APBD
TOTAL		Rp 9.462.887.500,00	

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
SUMBER DAYA AIR

Putussibau, Oktober 2018
Pihak Pertama
KEPALA SEKSI
IRIGASI, DANAU, SUNGAI DAN DRAINASE

Raimundus Jayang, S.T., M.Eng.
Penata Tk. I
NIP. 19690217 200301 1 001

NAMA
PANGKAT
NIP.

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KEPALA BIDANG JASA KONSTRUKSI

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018
1	2	3	4
1	Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan jasa konstruksi	Persentase pemberdayaan dan pengembangan jasa konstruksi	82,50%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1	Pengadaan alat - alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan	Rp 124.800.000,00	APBD
2	Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan	Rp 73.700.000,00	APBD
3	Pelaksanaan pengujian mutu konstruksi di lapangan dan laboratorium Dinas PU.BM&SDA	Rp 39.600.000,00	APBD
4	Sosialisasi dan publikasi informasi dan pengaturan terkait jasa konstruksi	Rp 54.247.000,00	APBD
5	Pembedayaan dan pengawasan jasa konstruksi di Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 91.850.000,00	APBD
6	Pelatihan tenaga terampil konstruksi	Rp 116.107.000,00	APBD
TOTAL		Rp 500.304.000,00	

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU

Putussibau, Oktober 2018
Pihak Pertama
KEPALA BIDANG JASA KONSTRUKSI

Hj. Ana Mariana,S.T.,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670325 199703 2 002

Ir. Salahuddin,M.T.
Pembina
NIP. 19640106 199903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018
1	2	3	4
1	Terselenggaranya Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten kapuas hulu	Jumlah peserta sosialisasi	60 Orang
2	Terlaksanannya Kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi di Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah penyedia jasa yang mengajukan rekon IUJK dan pembuatan kartu PJT	244 Pengajuan
3	Terlaksanannya pelatihan tenaga terampil konstruksi	Jumlah tenaga terampil yang di latih	30 Orang

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1	Sosialisasi dan publikasi informasi dan pengaturan terkait jasa konstruksi	Rp 54.247.000,00	APBD
2	Pembedayaan dan pengawasan jasa konstruksi di Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 91.850.000,00	APBD
3	Pelatihan tenaga terampil konstruksi	Rp 116.107.000,00	APBD
TOTAL		Rp 262.204.000,00	

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
JASA KONSTRUKSI

Putussibau, Oktober 2018
Pihak Pertama
KEPALA SEKSI
PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

Ir. Salahuddin,M.T.
Pembina
NIP. 19640106 199903 1 001

Ariwan
Penata Tk. I
NIP. 19650915 198703 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KEPALA SEKSI PENGUJIAN KONSTRUKSI

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pembuatan Disain Mix Formula dan Pengujian Mutu Konstruksi di Lapangan	Jumlah disainmix yang dibuat	100 Dokumen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1	Pengadaan alat - alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Rp 124.800.000,00	APBD
2	Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan	Rp 73.700.000,00	APBD
3	Pelaksanaan pengujian mutu konstruksi di lapangan dan laboratorium Dinas PU.BM&SDA	Rp 39.600.000,00	APBD
TOTAL		Rp 238.100.000,00	

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG
JASA KONSTRUKSI

Ir. Salahuddin,M.T.
Pembina
NIP. 19640106 199903 1 001

Putussibau, Oktober 2018
Pihak Pertama
KEPALA SEKSI
PENGUJIAN KONSTRUKSI

Marselinus Tajak
Penata Tk. I
NIP. 19660515 198603 1 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KEPALA UPJJ ID Wilayah I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018
1	2	3	4
1	Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan	- jumlah jembatan yang direhabilitasi/pemeliharaan	- Jembatan 22 Buah
		- Jumlah turap yang direhabilitasi/pemeliharaan	- Turap kayu 1 Buah

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Rp 2.558.879.500,00	APBD
TOTAL		Rp 2.558.879.500,00	

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU

Putussibau, Oktober 2018
Pihak Pertama
KEPALA UPJJ ID Wilayah I

Hj. Ana Mariana.S.T.,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670325 199703 2 002

Yahya.S. T.
Penata Tk. I
NIP. 19680324 200604 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
KEPALA UPJJ ID Wilayah II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2018
1	2	3	4
1	Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan	- Jumlah ruas jalan yang direhabilitasi/pemeliharaan	- Jalan 5000 M ²
		- Jumlah jembatan yang direhabilitasi/pemeliharaan	- Jembatan 25 Unit

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Rp 2.138.848.300,00	APBD
TOTAL		Rp 2.138.848.300,00	

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN KAPUAS HULU

Putussibau, Oktober 2018
Pihak Pertama
KEPALA UPJJ ID Wilayah II

Hj. Ana Mariana,S.T.,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670325 199703 2 002

Arie Eko Apriyanto,S.T.
Penata
NIP. 19780401 199803 1 004